

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020)**

***THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE AND  
INTERGOVERNMENTAL REVENUE OF REGIONAL FINANCIAL  
PERFORMANCE***

***(Case Study on Provincial Government In Indonesia In 2020)***

**Ratma Budiana<sup>1</sup>, Sri Rahayu<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Telkom, Bandung

**ratmabudiana@student.telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>, sriahayu@telkomuniversity.ac.id<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Kinerja keuangan merupakan sistem yang digunakan oleh sektor publik atau pemerintah yang digunakan sebagai tolak ukur finansial yang dilaporkan dalam bentuk kinerja. Dalam penelitian ini ada 2 faktor yang dipilih oleh penulis dalam mempengaruhi kinerja keuangan yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Kinerja keuangan sendiri berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 33 provinsi yang di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun yaitu 2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS 23.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan semua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

**ABSTRACT**

*Financial performance is a system used by the public sector or government that is used as a financial benchmark that is reported in the form of performance. In this study, there are 3 factors chosen by the author in influencing financial performance, namely local revenue and balancing funds. Financial performance itself serves as a measure of the success of local governments in managing regional finances.*

*The purpose of this study was to examine the effect of the independent variable on the dependent variable. This study uses quantitative methods. The sampling technique in this research is purposive sampling. The sample in this study is the financial statements of 33 provinces in Indonesia within a period of one year, 2020. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS 23 application.*

*Based on research conducted, all variables simultaneously have a significant effect on regional financial performance. Partially local revenue has a negative effect on financial performance and balancing funds has a positive effect on financial performance.*

**Keywords: Local Government Revenue, Intergovernmental Revenue, Regional Financial Performance**

**1. Pendahuluan**

Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah guna membangun negara secara efektif dan efisien dengan dilaksanakan di daerah secara langsung. Terdapat beberapa definisi mengenai otonomi daerah, satu diantaranya yaitu otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni, 2015)<sup>[8]</sup>. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim & Hanafi, 2016)<sup>[3]</sup>. Namun pada Kinerja Keuangan pemerintah daerah yang di ukur dengan rasio efektivitas pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia masih terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan kinerja keuangannya pada tahun 2020, sehingga efektivitas kinerja keuangannya menurun.

Kinerja keuangan adalah gambaran pencapaian prestasi oleh organisasi dalam periode tertentu (Nugroho & Prasetyo, 2018)<sup>[5]</sup>. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal penting pemerintah daerah dan pihak yang membutuhkan Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah, yaitu salah satunya dalam menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas merupakan gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Susanto, 2019)<sup>[11]</sup>. Rasio tersebut diukur dengan menggunakan total realisasi pendapatan asli daerah dibagi dengan total anggaran pendapatan asli daerah. Semakin tinggi hasil persentase kinerja keuangan semakin efektif kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika persentase diatas 100% maka bisa disebut efektif, karena realisasi pendapatan asli daerah sudah optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua faktor yang pengaruhnya dalam setiap penelitian tidak konstan yaitu pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah menurut (Susanti & Ratih, 2016)<sup>[10]</sup> adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila PAD semakin besar berkontribusi terhadap APBD dan pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Putri & Darmayanti, 2019)<sup>[6]</sup>. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Budianto & Alexander, 2016)<sup>[2]</sup> dan (Sukma & Panji, 2018)<sup>[9]</sup> pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andirfa et al, 2016)<sup>[1]</sup> yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan dalam (Mulyani & Wibowo, 2017)<sup>[4]</sup> hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti, realisasi pendapatan asli daerah yang tinggi tidak di dukung dengan kinerja yang optimal. Sehingga mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini diberikan kepada daerah karena setiap daerah memiliki kemampuan dan potensi daerah yang berbeda dalam menghasilkan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi dana perimbangan yang diterima maka akan menunjukkan bahwa semakin kuat ketergantungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dan kinerja keuangan pemerintah akan menurut (Andirfa, 2016)<sup>[1]</sup>. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanulang, (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budianto Alexander, 2016)<sup>[2]</sup> dan (Andirfa et al, 2016)<sup>[1]</sup> yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 2. Dasar Teori dan Metodologi

### 2.1 Dasar Teori

#### A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014<sup>[13]</sup> adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berikut merupakan rumus pendapatan asli daerah yang digunakan peneliti:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

(2.1)

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila PAD semakin besar berkontribusi terhadap APBD dan pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Putri & Darmayanti,

2019)<sup>[6]</sup>. Oleh sebab itu, kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Berdasarkan hal diatas bisa disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Budianto & Alexander, 2016)<sup>[2]</sup>, (Antari dan Panji, 2018)<sup>[9]</sup>, serta (Sari dan Mustanda, 2019)<sup>[7]</sup>, yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

### H1: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

#### B. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

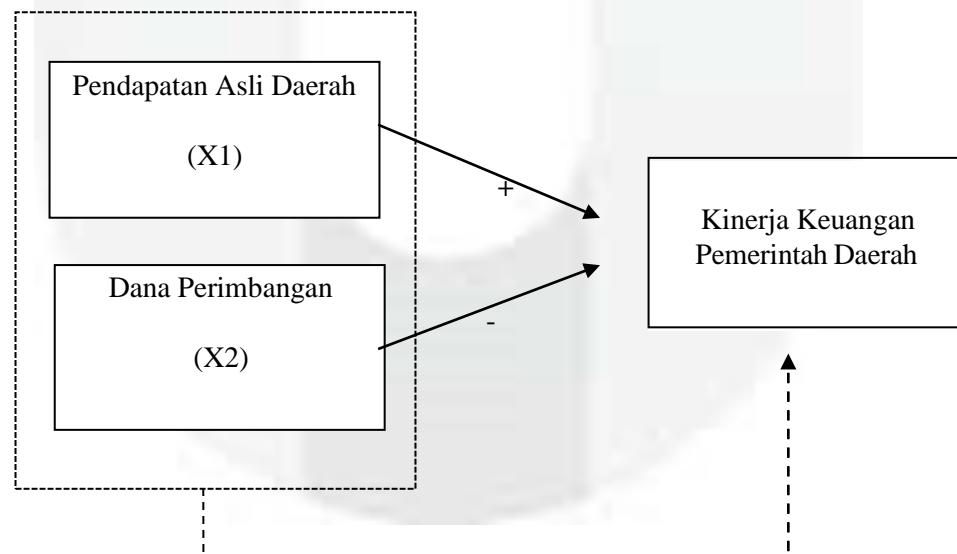
Dana perimbangan Berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004<sup>[12]</sup> adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikut merupakan rumus dana perimbangan yang digunakan peneliti:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

(2.2)

Dengan adanya pemberian dana perimbangan maka akan menurunkan suatu kemampuan daerah dalam hal pengelolaan daerah yang efektif. Dana perimbangan merupakan dana bantuan atau transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga semakin tinggi dana perimbangan yang diperoleh suatu daerah menandakan daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat dan mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Andirfa, 2016)<sup>[1]</sup>. Berdasarkan hal diatas bisa disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan hal ini sejalan dengan pernyataan menurut yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

### H2: Dana Perimbangan Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



Keterangan:

—————> : Pengaruh Parsial  
 - - - - -> : Pengaruh Simultan

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

## 2.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 33 data dengan tahun penelitian satu tahun yaitu tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_i$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta Regresi

$\beta_1$  = Koefisien Regresi Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$\beta_2$  = Koefisien Regresi Dana perimbangan

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_2$  = Dana Perimbangan

$\varepsilon_i$  = Tingkat Kesalahan Pengganggu (standar error)

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	33	351.407.203.869	3.742.594.028.519	4.749.636.780.866	7.481.457.755.660
DAPER	33	1.294.616.667.158	16.897.722.313.632	4.560.221.911.714	4.131.385.020.534
Kinerja keuangan	33	0,55957	1,06747	0,84392	0,11583
Valid N (listwise)	33				

Sumber : hasil output SPSS 23 (data diolah tahun 2021)

Berdasarkan Pengujian Analisis Deskriptif, dapat disimpulkan bahwa:

- Hasil dari pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini menjelaskan secara deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 351.407.203.869 terdapat pada provinsi Sulawesi barat dan nilai maksimum sebesar 37.42.594.028.519 terdapat pada provinsi DKI Jakarta dengan nilai rata-rata sebesar 4.749.636.780.866 dan nilai standar deviasi sebesar 7.481.457.755.659,826. Pada variabel ini, data bersifat heterogen atau bervariasi karena nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi.
- Variabel dana perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 1.294.616.667.158 yang terdapat pada provinsi Bangka Belitung dan nilai maksimum sebesar 16.897.722.313.632 terdapat pada provinsi DKI Jakarta. Nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 4.560.221.911.714 dan nilai standart deviasi sebesar 4.131.385.020.534 yang artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga dapat diartikan bahwa data tersebut tidak bervariasi atau cenderung berkelompok.
- Variabel kinerja keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0,55957 terdapat pada provinsi Nusa Tenggara Timur dan nilai maksimum sebesar 1,06747 terdapat pada provinsi Papua. Nilai rata-rata sebesar 0,84392 atau setara dengan 84% yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah cukup efektif dan nilai standart deviasi sebesar 0,11583. Sehingga dapat diartikan bahwa standar deviasi memiliki nilai lebih kecil dari nilai rata-rata, artinya data tersebut tidak bervariasi dan homogen.

### 3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 2**  
**Analisis Regresi Linnear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	,744	,054	
1 PAD	-1,241E-013	,000	-,914
DAPER	1,391E-013	,000	,818

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan

Sumber: hasil Output SPSS 23 (data diolah tahun 2021)

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.9 adalah :

$$Y_{\text{Kinerja keuangan}} = 0,744 - 0,000000000001241\text{PAD} + 0,000000000001391\text{DP}$$

Makna dari persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta regresi sebesar 0,744 pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dianggap nol, maka (Y) kinerja keuangan pada perusahaan pemerintah provinsi di indonesia tahun 2020 adalah sebesar 0,744.
2. Nilai satuan regresi pendapatan asli daerah sebesar -0,0000000000001241 menyatakan bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah 1%, maka kinerja keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,0000000000001241 satuan.
3. Nilai satuan regresi dana perimbangan sebesar 0,0000000000001391 menyatakan bahwa setiap peningkatan dana perimbangan profitabilitas 1 %, maka kinerja keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,0000000000001391 satuan.

### 3.3 Pengujian Hipotesis

#### 3.3.1 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat.

**Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,427 <sup>a</sup>	,183	,128	,18428545

a. Predictors: (Constant), DAPER, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja keuangan

Sumber: hasil output SPSS 23 (data diolah tahun 2021)

Nilai ini R adalah sebesar 0,128 atau sebesar 12,8% yang artinya bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan hanya menjelaskan variasi variabel kinerja keuangan sebesar 12,8% dan sisanya 87,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini seperti belanja modal, ukuran pemerintah, opini audit, dan faktor-faktor lainnya.

#### 3.3.2 Uji Simultan ( Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen



**Tabel 4 Uji Simultan**ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,228	2	,114	3,349	,049 <sup>b</sup>
	Residual	1,019	30	,034		
	Total	1,246	32			

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan

b. Predictors: (Constant), DAPER, PAD

*Sumber : SPSS 23 data diolah (2021)*

Dalam uji ini diperoleh nilai f signifikan sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan atau bersama-sama terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020.

### 3.3.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah setiap masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 5 Uji t**Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,744	,054		13,843	,000
	PAD	-1,241E-013	,000	-,914	-2,587	,015
	DAPER	1,391E-013	,000	,818	2,317	,028

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan

*Sumber : SPSS 23 data diolah (2021)*

Nilai t tabel untuk probabilitas 0,05 pada derajat bebas  $n = 33$  adalah sebesar 1,69092. Dengan demikian hasil pengujian secara parsial (Uji t) adalah sebagai berikut :

1. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikan sebesar  $0,015 < 0,05$ , maka variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020.
2. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikan sebesar  $0,028 < 0,05$ , maka variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020.

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian secara simultan atau uji F memperoleh hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020.

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t Pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,015 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 yang berarti, pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh dengan arah negative

dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020 atau dapat diartikan bahwa, semakin tinggi pendapatan asli daerah semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah dibangun, yaitu Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka kinerja keuangan akan menurun. Hal ini berarti perolehan kekayaan berupa PAD belum optimal sehingga pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah belum mampu untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan terbesar pemerintah provinsi di Indonesia diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah menurun yang di akibatkan adanya Covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wibowo dan Mulyani (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Sarbagita provinsi Bali.

#### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana perimbangan berdasarkan tabel 4.12 hasil penelitian memiliki nilai signifikan 0,013 lebih kecil dibandingkan 0,05 yang berarti dana perimbangan secara parsial berpengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020. Semakin tinggi dana perimbangan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang telah dibangun, yaitu dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2020. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat maka anggaran yang dikelola pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan akan lebih tinggi dan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik dan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Azis (2016), yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4. Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Sampel dari penelitian ini sebanyak 33 sampel provinsi selama satu tahun yaitu tahun 2020.

Berdasarkan uji simultan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu, kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020.

#### **REFERENSI**

- [1] Andirfa, M. et al. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5 (3), 30–38.
- [2] Budianto, & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *EMBA Desember 2016*, 4(4), 844–851.
- [3] Halim, A., & Hanafi, M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi kel). UPP STIM YKPN.
- [4] Mulyani, S., & Wibowo, H. (2015). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *XV(1)*, 57–66.
- [5] Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan*

*Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>

- [6]Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). *PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI* Ni. 8(5), 2834–2861.
- [7]Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). *PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*. 8(8).
- [8]Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik teori Konsep Aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- [9]Sukma, A. N. P. G., & Panji, I. B. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2015). *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110.
- [10]Susanti, R., & Ratih, A. E. (2016). *TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DIPROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2011-2016*. 9, 1–17.
- [11]Susanto, H. (2019). *Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram*. 7(1), 81–92.
- [12]Undang-Undang Republik Idnonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004).
- [13]Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah. (2014).